



## **Kerjasama Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Republik Afrika Tengah**

**Rahellia Bayu Stella Kristy**

Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Continous humanitarian crises in the Central African Republic are instigated by the armed conflicts involving underage combatants also known as child soldiers. Set against this phenomenon, the Government of Central African Republic is trying to overcome the issue by initiating collaboration with UNICEF, hoping to put an end to the use and recruitment of said underage soldier operating and fighting throughout the territory of the Central African Republic. The objective of this research is to analyze the existing collaboration between the Republic of Central Africa and UNICEF by firstly, describing the conflict in the Central African Republic and then followed by tabling the factors that enable the recruitment of the children of the war, and as well providing analyses on the UNICEF's role in handling the case of child soldier recruitment and the obstacles that the organization has to endure from its attempt of doing so in the region of Central African Republic. This research employs qualitative method by collecting data from books, NGO's reports, and mass media. The explanation about the collaboration between UNICEF and the Central African Republic is given by utilizing the standpoint of *Liberalism* together with the perspectives of the concepts of *Cooperation* and *International Organization*, respectively. This research concludes that the presence of a number of obstacles in the collaborative work between UNICEF and the Government of Central African Republic has been the primary reason that made the collaboration between the two actors, arguably, has not been entirely and fully successful.

**Keywords:** *Child Soldiers, Central Africa Republic, UNICEF, Cooperation.*

### **Pendahuluan**

Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara berbentuk republik yang merdeka pada tanggal 13 Agustus tahun 1960 dari negara Perancis, Republik Afrika Tengah terletak di pedalaman benua Afrika. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Sudan, Chad, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo dan Kamerun. Ibukota Afrika Tengah adalah Bangui, mayoritas penduduk Republik Afrika Tengah tinggal di daerah barat dan tengah negara, terutama di dalam dan sekitar ibu kota Bangui. Republik Afrika Tengah telah merdeka pada tahun 1960 dari Perancis, namun masyarakatnya sendiri belum merdeka dikarenakan masih banyak pemberontakan dan

kudeta militer yang dilakukan sehingga menghambat kemajuan negara tersebut. Pemerintah cukup kuwalahan dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di wilayah negaranya, dari adanya selisihan paham kesukuan, ras, agama, dan kelompok-kelompok pemberontak yang terus bermunculan merupakan penyelesaian yang cukup sulit bagi pemerintah. Selain itu permasalahan yang sangat serius terjadi di Afrika Tengah adalah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat perselisihan dan dendam masa lalu antar golongan tertentu di Afrika, hal tersebut menjadikan adanya perang yang bersifat terus menerus hingga berakibat ke anak cucu mereka.

Francois Bozize selaku Presiden Republik Afrika Tengah kini menghadapi aksi pemberontakan dari kelompok bersenjata dan milisi-milisi pro-pemerintah di Republik Afrika Tengah yang terus meningkatkan upaya merekrut dan melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata mereka di Republik Afrika Tengah. Pemberontakan tersebut berlangsung pada tahun 2012 hingga tahun 2013 antara Pemerintah Republik Afrika Tengah dan pemberontak, yang di antaranya pernah terlibat dalam Perang Semak Republik Afrika Tengah. Ketegangan di Afrika Tengah telah berhenti pada tahun 2007, perang semak, yang berlangsung tahun 2004 berhenti di tahun 2007 setelah pemerintah Afrika Tengah dan kelompok-kelompok pemberontak tersebut menyetujui dan menandatangani perjanjian damai di Birao, sebuah kota di Afrika Tengah. Dari kesepakatan atau perjanjian damai tersebut menghasilkan beberapa poin yaitu kelompok-kelompok pemberontak setuju untuk berhenti melaksanakan aksinya dan tidak angkat senjata selain itu sebagian dari kelompok pemberontak tersebut akan direkrut untuk menjadi tentara nasional Afrika Tengah, mereka diperbolehkan untuk membentuk partai politik yang legal. Presiden Bozize diharapkan untuk tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilihan presiden selanjutnya, dan adanya perombakan ulang komposisi parlemen Afrika Tengah.

Setelah adanya perjanjian damai tersebut, Seleka pun berhenti melakukan pemberontakan yang berakhir untuk beberapa lama. Dengan berjalannya waktu, Seleka merasa tidak puas dengan kesepakatan tersebut karena Pemerintah tidak menepati kesepakatan yang telah mereka buat, para anggota kelompok pemberontak tidak segera direkrut untuk menjadi bagian dari militer Afrika Tengah. Namun tahun 2012 koalisi pemberontak Seleka menyatukan beberapa kelompok pemberontak dari utara, kelompok-kelompok pemberontak bersatu atau membentuk aliansi dari kelompok pemberontak UFDR, CPJP, CPSK, FDPC, dan FPR, diketahui bahwa Presiden François Bozize gagal mematuhi perjanjian damai yang ditandatangani tahun 2007. Seleka menuntut agar Presiden François Bozize mundur dan terhitung sejak bulan Maret 2013, Seleka menjadi penguasa baru Afrika Tengah pasca keberhasilannya menggusur rezim pimpinan François Bozize.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pemberontakan kelompok bersenjata dan milisi-milisi pro pemerintah di Afrika terus meningkatkan upaya merekrut dan melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata mereka di Republik Afrika Tengah. Pemerintah memiliki peran yang cukup penting untuk dapat menjamin kehidupan aman dan sejahtera terhadap warga negaranya. Perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak yang tidak sah di jajaran kelompok bersenjata merupakan kenyataan yang mengkhawatirkan bagi anak-anak Republik Afrika Tengah. Pemerintah Afrika Tengah berupaya untuk dapat menjalin kerjasama dengan UNICEF untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga dapat diharapkan tidak ada lagi perekrutan anak-anak di Afrika Tengah yang menjadi tentara anak. Tentu saja hal itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab UNICEF dalam menangani tentara anak di

negara Afrika Tengah yang merupakan salah satu institusi dunia yang memperjuangkan hak anak, dan diharapkan dapat membuat banyak perubahan.

## **Pembahasan**

Konflik bersenjata harus dihindari oleh setiap individu atau negara karena dampak dari konflik tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar, kerugian tersebut bisa secara materi maupun non materi. Konflik bersenjata cukup menimbulkan banyak korban yang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak sering mengalami tindakan teror dan kekerasan, perempuan dilecehkan dan dijadikan budak seks selain itu anak-anak tersebut juga direkrut dan dipaksa untuk ikut serta dalam medan perang dan menjadi objek tindakan kekerasan.

Fenomena perekrutan tentara anak merupakan akibat dari konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah sebagai salah satu contoh kejahatan transnasional dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terfokus kepada pelanggaran hak anak-anak. Direkrut atau digunakan oleh kelompok bersenjata akan memberi dampak seumur hidup pada anak-anak, bagi mereka yang bertahan hidup akan menjadi pengalaman yang mengerikan bagi mereka, aspek traumatis dari kebrutalan yang mereka saksikan, dan mereka alami dapat memiliki efek psikologis yang mendalam hingga mereka dewasa. Tentara pemerintah dan tentara pemberontak telah merekrut puluhan ribu anak-anak yang sebagian besar adalah anak laki-laki dan banyak juga anak perempuan yang ikut terlibat, banyak di antaranya direkrut secara paksa, diambil dari jalanan atau bahkan dari sekolah dan panti asuhan sedangkan yang lainnya didorong untuk bergabung dengan kelompok bersenjata karena ketakutan atau kemiskinan, anak-anak menginginkan adanya perlindungan dari kekerasan di sekitar mereka. Anak laki-laki dijadikan sebagai kuli atau sebagai suruhan sedangkan anak-anak perempuan diberi utusan untuk menyiapkan makanan atau merawat orang yang terluka, meskipun mereka juga dipaksa untuk menjadi budak seks dengan tentara lainnya yang lebih dewasa, selain itu mereka tetap dipaksa untuk terjun ke medan perang. Beberapa bahkan dipaksa untuk melakukan kekejaman terhadap keluarga mereka sendiri sebagai cara untuk memutuskan semua hubungan dengan komunitas mereka.

Dalam negara-negara yang sering terlibat konflik secara otomatis akan berdampak pada masyarakatnya baik perempuan dan anak-anak, faktor dalam perekrutan tentara anak yang paling utama adalah tidak berdayanya lagi pemerintah beserta aparat militer dalam mennggulangi konflik yang awal mulanya kecil hingga menjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa, maka anak-anak juga dipaksa untuk turut dalam kegiatan konflik bersenjata tersebut. Banyak kelompok-kelompok pemberontak ataupun milisi pemerintah yang sedang berkonflik melibatkan anak-anak dalam berperang, anak-anak direkrut dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perekrutan anak menjadi kelompok bersenjata, banyak anak-anak yang bergabung untuk mendapatkan uang, sebagai alasan untuk tetap hidup, atau kekuatan. Iming-iming dalam hal ekonomi diterapkan kelompok bersenjata untuk tetap mempengaruhi anak-anak sehingga anak-anak tersebut tetap ingin dalam kelompok. Anak-anak yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata sering mati atau terluka dalam pertempuran. Jika tidak, maka mereka dipaksa untuk melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menyiapkan ranjau darat dan bahan peledak. Laki-laki maupun perempuan dalam perang hidup dalam kondisi menyedihkan, di

berikan makanan namun tidak mempunyai akses layanan kesehatan. Dalam kebanyakan kasus mereka diperlakukan dengan kejam, mereka dipukuli dan dihina agar mereka dapat tunduk kepada pemimpin. Apabila mereka melakukan kesalahan, hukuman yang datang sangat kasar atau bahkan mengancam nyawa mereka. Keputusan berpartisipasi dalam konflik bersenjata seringkali ditentukan oleh struktur sosial ekonomi serta struktur masyarakat dan keluarga yang telah hancur akibat situasi konflik bersenjata. Kemiskinan dan kurangnya akses ke pendidikan atau lapangan kerja merupakan faktor paling utama yang memungkinkan banyak pemuda untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata. Anak-anak perempuan tidak mencari cara untuk membalas dendam dan membawa kerugian bagi mereka yang telah digunakan oleh kelompok bersenjata. Mereka hanya mencari cara untuk memberikan kontribusi, untuk melakukan sesuatu yang berarti yang produktif dengan kehidupan mereka. Sementara yang biasa terlihat adalah anak laki-laki memegang AK-47, sedangkan anak-anak perempuan yang berada di belakang garis dan dikamp mereka juga bisa dikatakan tentara, mereka memasak atau melakukan tugas dengan menjadi budak seks.

Kerjasama internasional diperlukan karena pada dasarnya semua negara tidak dapat berdiri sendiri dimana kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar negara ataupun organisasi non negara. UNICEF dan Pemerintah Republik Afrika Tengah bekerjasama untuk memberantas kasus perekrutan tetara anak di negara Republik Afrika Tengah. UNICEF merupakan sebuah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak diseluruh dunia. Melihat ancaman yang ditimbulkan oleh kasus perekrutan tentara anak, UNICEF telah melakukan serangkaian upaya-upaya untuk menangani kasus tersebut. Republik Afrika Tengah melakukan kerjasama dengan UNICEF yang merupakan organisasi internasional dan saling membuat kesepakatan dalam proses kerjasama antara pihak yang terkait.

Terdapat berbagai hak-hak anak yang perlu di lindungi dan ditegakkan, melihat banyak sekali hak anak yang disepelekan dan tidak diperhatikan lagi, sehingga muncul banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak terhadap anak. Hak-hak anak tersebut adalah 1) Hak dan kebebasan sipil, setiap anak memiliki hak dan kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa, misalnya untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Namun anak tidak mempunyai hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu ataupun hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sebagaimana anak-anak di Republik Afrika Tengah tidak mempunyai hak kebebasan sipil untuk bebas berpikir sesuai usianya, namun pada kenyataannya mereka dipaksa untuk berpikir sesuai dengan kehendak pemimpin dalam kelompok bersenjata untuk melakukan perintahnya, yaitu terjun ke dalam medan perang. 2) Hak atas lingkungan keluarga. Merupakan hak asasi khusus untuk anak. Orang dewasa tidak mempunyai hak ini. Berarti bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orangtuanya. Jika orangtua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti. Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik, mental, seksual, dan penelantaran atau pengabaian) oleh orangtua atau wali anak. Anak-anak di Republik Afrika Tengah tidak memiliki hak tersebut karena mereka dihadapkan dengan kondisi perang dan mereka tidak dilindungi oleh siapapun, mereka dipisahkan dari orang tua mereka untuk terjun ke

medan perang, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik dan mental, mereka dipekerjakan secara paksa dan kebanyakan anak-anak perempuan dijadikan budak seksual, mereka juga mengalami penelantaran dan pengabaian. Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian, maka Negara wajib memberikan perlindungan kepada anak, namun pada kenyataannya pihak pemerintah Republik Afrika Tengah kurang serius dalam menegakkan hak-hak anak di Republik Afrika Tengah. 3) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, yaitu pencegahan penyakit, kurang gizi dan pengurangan angka kematian bayi, mendapatkan layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang tidak cacat. Kondisi anak-anak di Republik Afrika Tengah sangat menyedihkan. Pembunuh terbesar bagi anak-anak di Republik Afrika Tengah bukanlah peluru tetapi kekurangan gizi, malaria, infeksi saluran pernafasan dan diare (<http://tabloidjubi.com>). memang keadaan anak-anak di Republik Afrika Tengah sangatlah mengkhawatirkan, minimnya tenaga kesehatan menyebabkan tingginya tingkat kematian penduduk di Republik Afrika Tengah. 4) Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar, hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi dan hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya didalam masyarakatnya. Anak-anak di Republik Afrika Tengah sangat minim terhadap pendidikan, hak mereka untuk menerima pendidikan telah ditukar oleh keadaan Republik Afrika Tengah yang parah pada saat ini, mereka juga tidak memiliki hak untuk bermain dan berekreasi serta terlibat aktif dalam kegiatan budaya masyarakatnya. 5) Hak atas perlindungan khusus. Terdapat hak perlindungan khusus untuk kelompok anak tertentu, antara lain pengungsi anak, anak yang berkonflik dengan hukum, ataupun anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing. Selain itu terdapat juga untuk semua anak dalam situasi perang atau sengketa bersenjata, dari eksploitasi ekonomi, dari penyalah-gunaan narkoba, eksploitasi dan kekerasan seksual, daripenjualan, penculikan dan perdagangan anak, hingga eksploitasi dalam bentuk lainnya. Keadaan di Republik Afrika Tengah mengakibatkan hak atas perlindungan khusus tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak di Republik Afrika Tengah, mereka dieksploitasi oleh beberapa kelompok pemberontak untuk terjun ke medan perang, mereka dipekerjakan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu, mereka juga diberikan obat-obatan terlarang oleh kelompok pemberontak di Republik Afrika Tengah.

Permasalahan perekrutan tentara anak kini menjadi sebuah masalah yang harus mendapat perhatian yang serius, tidak hanya dari pemerintah saja melainkan dari masyarakat juga, selain itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak karena tindak kejahatan dalam perekrutan tentara anak ini merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat mengambil hak-hak tersebut dari anak. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Republik Afrika Tengah dengan UNICEF tidak sepenuhnya berhasil, karena masih saja terjadi perekrutan anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan proses kerjasama tersebut belum berhasil secara maksimal, hambatan yang pertama yaitu minimnya kepercayaan (ketidaktahuan rekam jejak pihak lain), UNICEF tidak yakin akan kerjasama antara pihaknya dengan negara Republik Afrika Tengah karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai kepemimpinan di Republik Afrika Tengah. Hambatan yang kedua yaitu perbedaan hukum. Menurut UNICEF, definisi tentara anak adalah seorang tentara anak dapat diartikan sebagai anak laki-laki ataupun perempuan di bawah 18 tahun, baik yang langsung mengambil

bagian dalam kontak bersenjata atau yang tidak langsung terlibat dalam kontak senjata seperti; memasak, penjaga pintu, menyampaikan pesan, dan siapa saja yang mengiringi kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam suatu konflik, sedangkan pada Konvensi Jenewa tahun 1994 dan Protokol Tambahan pada tahun 1977 menetapkan 15 tahun sebagai batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik senjata. Ketiga adalah hambatan operasional, UNICEF mengalami kesulitan dalam hal dana, UNICEF mengaku kekurangan dana dalam menyelesaikan kasus tersebut dan membantu kondisi anak-anak di wilayah negara Republik Afrika Tengah, selain itu sumber daya manusia di negara Republik Afrika Tengah juga belum mampu mendukung akan adanya kerjasama Republik Afrika Tengah dengan UNICEF, para stakeholder di negara tersebut belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hambatan ke empat adalah Konflik yang berkelanjutan, aksi kekerasan dan konflik yang berkelanjutan dan terus menerus terjadi di negara Republik Afrika Tengah juga menghambat penyaluran bantuan UNICEF terhadap penduduk di Republik Afrika Tengah. infrastruktur jalan dan transportasi di Republik Afrika Tengah mengalami kerusakan, itu berarti bahwa bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan bisa menjadi tantangan yang luar biasa, membutuhkan pengiriman lewat udara yang memerlukan biaya yang mahal atau bisa menghabiskan waktu sehari-hari dengan jarak yang jauh, ketidakamanan pun menjadi kendala bagi tim untuk mengakses populasi penduduk yang paling membutuhkan.

### **Kesimpulan**

Permasalahan yang sangat serius terjadi di Afrika Tengah adalah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat perselisihan dan dendam masa lalu antar golongan tertentu di Afrika, hal tersebut menjadikan adanya perang yang bersifat terus menerus hingga berakibat ke anak cucu mereka. Republik Afrika Tengah dilanda oleh konflik yang sedang berlangsung di kalangan tentara, kelompok nasional dan kelompok bersenjata asing, yang mengacaukan lingkungan di mana perempuan dan anak-anak tinggal. Konflik di kalangan tentara dan enam kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang kompleks dan berlarut-larut. Republik Afrika Tengah, memiliki perjalanan yang perang yang melibatkan anak-anak untuk turut beraksi dalam pertempuran.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, yaitu konflik itu sendiri yang terjadi di Republik Afrika Tengah merupakan aktivitas yang awalnya dilakukan oleh pemberontak yang tidak puas atas kinerja pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai kepemimpinan di Republik Afrika Tengah membuat rakyat merasa harus ada perubahan di dalam negara tersebut. Selain konflik terdapat juga faktor lain, yaitu kemiskinan. Republik Afrika Tengah termasuk dalam negara yang lemah karena tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Terbukti dalam *United Nation Human Development Index*, negara ini berada pada peringkat 180 dari 186 negara (UNDP, 2014) yang masih berada dibawah garis kemiskinan, selain itu Republik Afrika Tengah masuk sebagai negara gagal saat pemerintah pusatnya tidak mampu lagi mengontrol dan mengawasi keadaan seluruh wilayahnya. Faktor lainnya adalah politik, pembagian kekuasaan juga tidak merata karena banyak elite politik yang menguasai kursi pemerintahan, kelompok kelompok di wilayah utara Republik Afrika Tengah merasa aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat, selain itu kebanyakan pemimpin Afrika Tengah melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri. Faktor selanjutnya adalah pendidikan, sebagian besar anak di Afrika tidak

memiliki pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Sebagian dari mereka pergi bekerja membantu orang tuanya, dan beberapa yang lain mengalami kekurangan gizi akibat dari kemiskinan yang menimpa keluarganya. Pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor mengapa kemiskinan di Republik Afrika Tengah belum juga berakhir. Konflik memengaruhi peluang anak-anak menerima pendidikan berkualitas, pemerintah juga melemah selain itu pemerintah kesusahan untuk menyediakan sarana pendidikan yaitu sekolah, terutama di daerah terpencil, selain hal itu konflik menyebabkan penurunan persediaan guru yang menunjang pendidikan di negara tersebut.

Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF bekerjasama untuk memberantas kasus perekrutan tentara anak di negara Republik Afrika Tengah. Permasalahan perekrutan tentara anak kini menjadi sebuah masalah yang harus mendapat perhatian yang serius, tidak hanya dari pemerintah saja melainkan dari masyarakat juga. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Tindak kejahatan dalam perekrutan tentara anak ini merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat mengambil hak-hak tersebut dari anak. Pemerintah Republik Afrika Tengah berupaya untuk dapat menjalin kerjasama dengan UNICEF untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga dapat diharapkan tidak ada lagi perekrutan anak-anak di Afrika Tengah yang menjadi tentara anak. Namun kerjasama tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan, masih terdapat anak-anak yang terlibat konflik bersenjata di Republik Afrika Tengah. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama Pemerintah Republik Afrika Tengah adalah 1).Minimnya Kepercayaan (Ketidaktahuan rekam jejak pihak lain) 2) Perbedaan hukum 3) Pendanaan yang minim 4) Sumber daya Manusia dan, 5) Konflik yang berlarut.

## Referensi

- Abdullah Chaidar (24 April 2013) Pendidikan di Republik Afrika Tengah hancur akibat konflik, dari antara news:  
<<https://www.antaraneews.com/berita/370992/pendidikan-di-republik-afrika-tengah-hancur-akibat-konflik> > diakses 7 November 2017
- Armandhanu, Denny (19 Desember 2014) *Ada 10 Ribu Tentara Anak di Republik Afrika Tengah*, dari CNN Indonesia:  
<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141219171701-127-19401/ada-10-ribu-tentara-anak-di-republik-afrika-tengah/>> diakses 8 Agustus 2017
- Attacks On education The impact of conflict and grave violations on children's. 2013 futures  
<<https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/attacks-on-ed-2013.pdf>> diakses 16 Januari 2017
- Children bear the brunt of poverty. 2017  
<<https://data.unicef.org/topic/overview/child-poverty/>> diakses 29 Januari 2018
- Convention on the Rights of the Child  
<<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>> diakses 5 Januari 2018

- Haryono, Willy (18 Desember 2014) PBB Butuh Dana Lebih untuk Bantu Anak-Anak Afrika, dari internasional metro news:  
 <<http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Dkq2pLpK-pbb-butuh-dana-lebih-untuk-bantu-anak-anak-afrika>> diakses 27 Februari 2018
- International Crisis Group (ICG). 2007. "Central African Republic Anatomy Of A Phantom State". Africa Report No.136  
 <[https://www.files.ethz.ch/isn/50168/136\\_central\\_african\\_republic.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/50168/136_central_african_republic.pdf)> diakses 26 Juni 2018
- Tim Redaksi. 2012. Rebel Union in Central African Republic Raises Humanitarian Concerns. <<http://www.theguardian.com/globaldevelopment/2012/dec/21/rebel-central-africanrepublic-humanitarian.>> diakses 29 Agustus 2017
- UNICEF Humanitarian Action for Children 2013  
 <[https://www.unicef.org/appeals/files/CAR\\_2013\\_HAC\\_Final.pdf](https://www.unicef.org/appeals/files/CAR_2013_HAC_Final.pdf)> diakses 25 Juni 2018
- UNICEF annual report. 2014  
 <[https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Central\\_African\\_Republic\\_Annual\\_Report\\_2014.pdf](https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Central_African_Republic_Annual_Report_2014.pdf)> diakses 17 Juni 2018
- UNICEF Humanitarian Action for Children 2015  
 <[https://www.unicef.org/appeals/files/HAC\\_Overview\\_2015\\_WEB\\_27\\_01\\_15.pdf](https://www.unicef.org/appeals/files/HAC_Overview_2015_WEB_27_01_15.pdf)> diakses 14 Juli 2018
- UNICEF Annual Report 2016  
 <[https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Central\\_African\\_Republic\\_2016\\_COAR.pdf](https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Central_African_Republic_2016_COAR.pdf)> diakses 11 Agustus 2018